

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Tim Khusus Evaluasi Dana Desa
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Ciamis
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.6
Edisi	: Kamis, 24 Mei 2018

Tim Khusus Evaluasi Dana Desa

Baru 12 dari 258 Desa di Ciamis Mengajukan Dana Desa Tahap II

CIAMIS, (PR).-

Baru 12 dari 258 desa di Tatar Galuh Ciamis yang mengajukan pencairan dana desa (DD) tahun 2018 tahap II. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) segera menerjunkan tim khusus untuk membantu menyelesaikan dan percepatan pengajuan DD tahap berikut.

"Sampai saat ini baru ada 12 desa yang mengajukan pencairan tahap II. Mereka yang mengajukan tentunya sudah melengkapi seluruh persyaratan. Kami berharap desa lainnya segera menyusul menuntaskan pekerjaan dan menyusun SPJ (surat pertanggungjawaban) atau laporan pertanggungjawaban," tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Ciamis Lily Romli,

Rabu (23/5/2018).

Dia mengatakan, pencairan DD tahap I sudah berjalan 100 persen. Hanya, untuk pengajuan tahap II harus melengkapi persyaratan, di antaranya pertanggungjawaban anggaran DD tahap I, RAPBD berikut pemanfaatannya.

"Kami segera menerjunkan tim monitoring dan evaluasi ke desa-desa, khususnya yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban DD tahap I. DD tahap II bakal cair apabila tahap I sudah terserap seluruhnya dilengkapi dengan SPJ," tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Lily Romli, Mei-Juni sudah dimulai pencairan DD tahap II. DD tahun 2018 dibagi menjadi tiga tahap, yakni pertama 20 persen dan berikutnya tahap II dan III masing-masing 40 persen. Pemanfaatan DD, tuturnya, sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga pemakaiannya tidak boleh menyimpang dari aturan.

Lily mengatakan, besaran DD sudah ditetapkan oleh pemerintah

pusat. Hal tersebut juga memperhitungkan berbagai faktor, seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis, dan lainnya.

Dana desa yang diterima Kabupaten Ciamis tahun 2018 sebesar Rp 217 miliar lebih, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 220 miliar lebih, untuk 258 desa. Daerah yang menerima DD paling besar yakni Desa Hujungtiwu, Kecamatan Panjalu, sebesar Rp 1.192.740 sedangkan paling kecil Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, sebesar Rp 713.674.000.

Kepala Desa Karangkamulyan Muhamad Abdul Haris mengatakan, saat ini tengah menyusun laporan untuk pengajuan pencairan DD tahap II. Pemanfaatan DD tahap I sebesar Rp 153.700.000 sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.

Sementara itu, Inspektorat Sumedang turut membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan

desa karena dari waktu ke waktu tugas pengelolaan keuangan desa semakin berat. Hal itu seiring dengan relatif banyaknya sumber dana yang masuk dan harus dikelola pemerintahan desa.

"Guna membantu meringankan beban pengelolaan keuangan desa, kami sudah membuat program Serambi Inspektorat Sumedang (SIS). SIS ini sebagai media konsultasi dan advokasi untuk membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangannya," tutur Inspektur Kabupaten Sumedang Subagio ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut dia, program tersebut membantu lima kegiatan pengelolaan keuangan desa. Antara lain membantu pengelolaan keuangan desa, penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, membantu pengadaan barang dan jasa di desa, perpajakan, serta penguatan perekonomian desa melalui badan usaha milik desa. (Adang Jukardi, Nurhandoko Wiyoso)***